

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat problematika yang dialami oleh PSM dalam menjalankan perannya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peran PSM dalam penyaluran ini adalah sebagai adminisator yang membantu pendataan, verifikasi dan validasi masyarakat miskin kelurahan secara berkala, sebagai mediator yang membantu memberikan informasi sosialisai dan pencairan bantuan kepada KPM, sebagai fasilitator yang membantu memfasilitasi apabila terjadi kendala dalam proses penyaluran BPNT.

Proses penyaluran BPNT yang memiliki ragam alur implementasi yang dilakukan secara digital menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) maupun konservatif melalui penyaluran secara langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan di Kantor PT. POS Indonesia. Penyaluran secara langsung ini merupakan Kerjasama dengan Badan Usaha Logistik (BULOG). Penyaluran ini tidak selalu tidak memiliki jadwal yang konsisten dan juga metode yang tidak sama setiap kali penyalurannya.

Kebijakan yang cukup rumit ini menimbulkan problematika PSM. Problematika ini disebabkan oleh kondisi dari perekonomian, sosial dan budaya PSM. seperti beban yang relative berat tanpa insetif menjadi peluang gratifikasi, terhalangnya peranan akibat urusan domestik, PSM merupakan pencari nafkah tunggal sehingga PSM harus rangkap jabatan, status PSM yang abadi dan juga

banyaknya prasangka KPM terhadap BPNT. Celah celah kecacatan dalam kebijakan tersebut yang menjadi yang dimanfaatkan PSM sebagai peluang dalam menyelesaikan problematikanya walaupun bertentangan dengan ketentuan dan aturan sebagai PSM.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *Stake Holder* hendaknya melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah kebijakan dikarenakan masih terdapat banyaknya celah untuk terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Bagi PSM dan calon PSM hendaknya menyadari kapasitas diri dibandingkan mendahulukan keinginan semata. Hal ini bertujuan untuk menghindari altruisme ataupun terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ditengah tengah pembangunan.
3. Bagi akademisi hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan lebih banyak informan, sehingga penelitian ini lebih komprehensif dan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan

